

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan**

##### **1. Pandangan monistis**

Putusan dalam bahasa belanda antara lain *vonnis,vonnis een*<sup>10</sup>.

Sedangkan putusan menurut Soeparmono adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>11</sup>

Dalam kamus hukum putusan berarti putusan hakim yang menyelesaikan perkara<sup>12</sup>.

##### **a. Tinjauan Tentang Jenis Putusan Perkara Pidana**

###### **1) Putusan Pemidanaan (Veroodeling)**

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” hakim harus mendapat keyakinan berdasar minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. ”Tidak seorangpun dapat dipidana, kecuali karena alat bukti yang sah menurut hukum

---

<sup>10</sup> HB sutopo, 2002, Metodologi Penulisan Kualitatif, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

<sup>11</sup> Soeparmono, 2005, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju hal 146

<sup>12</sup> Fien Sosuharso, 2010, *Kamus Hukum*, hal.30

mendapat keyakinan untuk menyatakan seseorang bertanggung jawab dan bersalah”. Adapun macam-macam hukumannya sesuai pasal 10 KUHP, yaitu:

- a) Pidana pokok
- b) Hukuman mati
- c) Hukuman penjara
- d) Hukuman denda
- e) Kurungan
- f) Pidana tambahan
- g) Pencabutan hak tertentu
- h) Perampasan barang tertentu
- i) Pengumuman putusan hakim

## **2) Putusan bebas (*virjspraak*)**

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “ Jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Menurut Yahya Harahap, secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai”.

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dalam artian tidak memenuhi pasal 6 ayat 2 UU kekuasaan kehakiman. Dimana dijelaskan bahwa tiada

seorangpun dipidana, kecuali karena alat bukti yang sah menurut hukum serta mendapat keyakinan bahwa seseorang tersebut yang dianggap bertanggung jawab, terbukti bersalah atas dakwaan.

- b) Tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Pada pasal 183 KUHAP mengatur “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”.

### **3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsbervolging*)**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsbervolging*) diatur dalam pasal 191 ayat (2) “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>13</sup>

#### **a) Teori Penjatuhan Putusan**

- Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan berarti keseimbangan antara syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta kepentingan

---

<sup>13</sup> Krisna Santosa, *Jenis-Jenis Putusan Pidana*, dalam <http://krisnasantosa.com> acces 19 April 2017

para pihak yang terlibat dalam kasus yaitu antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban dan kepentingan penggugat atau tergugat.

- Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim sebagai direksi atau yang berwenang dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana dalam kasus perdata, hakim akan melihat kepada para pihak yakni penggugat dan tergugat (dalam kasus perdata), sedangkan dalam kasus pidana antara terdakwa dan penuntut umum. Dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, yang lebih ditentukan insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim

- Teori Pendekatan Keilmuan

Latar belakang dari teori ini adalah pemikiran bahwa penjatuhan putusan hakim haruslah dilakukan secara sistematis serta penuh kehati-hatian khususnya kaitannya putusan-putusan terdahulu yang bertujuan menjamin konstitensi putusan hakim.

- Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim dapat membantunya menghadapi kasus-kasusnya setiap hari.

- Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan kepada filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan kasus yang disengketakan kemudian menggali peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok kasus yang menjadi sengketa dalam memutus perkara dan putusan hakim harus di dasarkan motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.

- Teori Kebijakan

Teori ini menekankan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab mendidik, membina, melindungi terdakwa agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.<sup>14</sup>

#### **4) Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dibagi menjadi 2 (dua)**

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Adapun pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang di dasarkan fakta yuridis dalam persidangan dan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan hal tersebut antara lain:

---

<sup>14</sup> Allan Mason, 2001, *The Law Of setencing*, Irwin Law, hal 92-93

**a) Dakwaan**

Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana karena dari sinilah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan juga memuat identitas terdakwa serta uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana terjadi. Dakwaan yang digunakan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang disampaikan di depan pengadilan.

**b) Keterangan Terdakwa**

Berdasarkan pasal 183 butir e KUHP, keterangan terdakwa tergolong alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa adalah apa yang dikatakan disidang terhadap apa yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban dari pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

**c) Keterangan Saksi**

Keterangan saksi dapat dikategorikan menjadi alat bukti selama keterangan berkaitan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan membacakan sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam suatu putusan.

#### **d) Barang Bukti**

Barang bukti ialah barang yang dapat disita dan diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum di depan persidangan,

Meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

#### **e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana**

Dalam persidangan pasal yang digunakan selalu berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim membuktikan dengan memeriksa alat bukti terkait perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal peraturan pidana.

### **2. Pertimbangan Non-Yuridis**

- Latar Belakang Terdakwa

Setiap yang melatar belakangi terdakwa untuk mendorong keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

- Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana oleh terdakwa yang sudah tentu mengakibatkan timbulnya korban dan kerugian pihak lain. Bahkan dari perbuatan terdakwa yang mengandung unsur kejahatan tersebut dapat merugikan masyarakat secara luas, setidaknya berpengaruh pada keamanan dan ketentraman masyarakat.

- Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

- Agama Terdakwa

Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidaklah cukup hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, namun juga menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan hakim itu sendiri terutama terhadap tindakan para pelaku kejahatan<sup>15</sup>

## **b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **a. Pengertian**

---

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.



Tindak pidana atau delik berasal dari bahas latin, yakni *delictum* dan dalam bahasa belanda disebut *delict*. Dalam kamus besar bahasa indonesia, arti delik diberi batasan “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>16</sup>

#### 1) Pengertian dalam pandangan monistis<sup>17</sup>

Menurut D.Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Sedangkan menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Dan menurut Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dipenjara.

#### 2) Pengertian menurut pandangan dualistik

Menurut Pompe tindak pidana adalah dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Moeljatno

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 7

<sup>17</sup> Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perbaharuan*, UMM Press, hal 94-95

tindakan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Lebih lanjut yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahas belanda berarti *strafbaarfeit* atau dalam bahasa inggris disebut *delict* yang artinya perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat disebut subjek tindak pidana. Delik merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman barang siapa yang melakukannya dapat diancam hukuman serendah-rendahnya maupun setinggi-tingginya sesuai dengan perbuatan.<sup>19</sup>

### 3) Menurut Ajaran Kausalitas

Menurut ajaran kausalitas tindak pidana dibagi menjadi 2 yakni tindak pidana formil dan materiil

1. tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang terlarang. Contohnya Pencurian (362), apabila perbuatan mengambil selesai, maka pencurian itu selesai.
2. tindak pidana materiil ialah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang (unsur akibat konstitutif). Contohnya pada pembunuhan

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, 2003 Hal 59

(338) hilangnya nyawa orang lain dengan cara menusuk dengan pisau.<sup>20</sup>

## **b. Unsur Tindak Pidana (Delik)**

### **1. Unsur Subjektif**

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” kesalahan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*) para pakar membagi kesengajaan menjadi 3 (tiga bentuk), yakni

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

### **2. Unsur Objektif**

unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau negatif

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Hal 213

3) Keadaan-keadaan

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

4) sifat dapat melawan hukum dan melawan hukum<sup>21</sup>

**c. Tinjauan Tentang Pencurian**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata “curi” adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah biasanya sembunyi-sembunyi sedangkan pencurian adalah proses, cara, perbuatan.

1. Pencurian

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hak, hukum, karena perncurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda dengan sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Pencurian memiliki dua unsur yaitu unsur objektif dan subjektif:

1) Unsur objektif:

a) Perbuatan manusia

- Delik materil adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat tindakan.

---

<sup>21</sup> Leden,Op.Cit, Hal 9-10

- Delik formil adalah selain tindakan yang terlarang itu dilakukan masih harus ada akibatnya yang timbul, baru dikatakan terjadi tindak pidana tersebut.<sup>22</sup>

b) Unsur Subjektif:

- Dilakukan dengan kesalahan.
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup>

## 2. Pencurian Ringan

Ketentuan Pasal 362 KUHP digolongkan sebagai pencurian biasa merupakan ketentuan yang termasuk di dalam bidang hukum materiil. Peraturan ini menentukan suatu tindak pidana yang menunjukkan siapa yang dapat dipidana, perbuatan apa yang dapat dipidana, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

“ Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. ”

<sup>22</sup> Anonim, Cara Membedakan *Delik Formil Dan Material*, dalam <http://www.hukumonline.com>, acces 20 april 2017

<sup>23</sup> Anonim, Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dan Unsur Menurut Undang-Undang, dalam <http://www.landasanteori.com>

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362 KUHP);
  2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
  3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar , merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
  4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
  5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 250,-
- Putusan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa. Selain itu putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan.

Pencurian ringan menurut Tongat<sup>39</sup> adalah :

“ pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. ”<sup>24</sup>

#### **d. Tinjauan Tentang Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2012**

---

<sup>24</sup> Tongat, Hukum Pidana materiil, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006, hlm.41.

Latar belakang peraturan mahkamah agung nomor 02 tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang tergolong ringan dengan menggunakan pemeriksaan cepat, hal ini dapat di lihat pada penjelasan umum di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yang isinya:

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai baang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Pada umumnya masyarakat menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat

kemudian hanya tertuju ke pengadilan, dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancamannya paling lama 5 tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan KUHP para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHP) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45 huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009, perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Sudah seharusnya dengan kemunculan Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 dijadikan acuan pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana pencurian ringan, demi memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.



1) Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2012

Secara tersurat tidak ditulis secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun pada Pasal 8 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan:

“Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.<sup>25</sup>

2) Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Fungsi Perma adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya. Dasar hukumnya adalah UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 4 ayat (2) TAPMPR No. III/MPR/2000. Sebenarnya Perma ini

---

<sup>25</sup>Boyendra Tamin, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung*, dalam <http://www.boyyendratamin.com>, acces 20 April 2017

bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu (*pseudowetgeving/beleidsregels*).<sup>26</sup>

**e. Nota Kesepakatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012**

Nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*),

Kemunculan nota kesepahaman ini merupakan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat dan juga sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Yang pada dasarnya memiliki tujuan:

- 1) Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
- 2) Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Anonim, *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*, Dalam <http://www.fsps.or.id>, acces 20 April 2017

- a) Mengefektifkan pidana denda.
- b) Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada lapas atau rutan untuk mewujudkan keadilan berdimensi hak asasi manusia dan
- c) Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.<sup>27</sup> Keadilan yang ingin di capai dalam Nota kesepahaman ini ialah mengefektifkan lagi pidana denda dan membuat keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dalam penyelesaian perkara ini dilakukan dengan perdamaian antara pelaku dan korban yang nantinya perdamaian tersebut akan dikukuhkan dalam perdamaian tertulis

#### **f. Tinjauan Tentang Aspek Keadilan Hukum**

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 2 Nota Kesepakatan

(KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.<sup>28</sup>

Keadilan hukum menurut aristoteles dalam tulisannya *rhetorica* dibagi menjadi dua macam:

1) Keadilan distributif atau *justicia retributiva*

Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang karena jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Pengertian keadilan dalam keadilan distributif bukan persamaan melainkan perbandingan.

2) Keadilan kumulatif atau *justicia cummulativa*

Keadilan kumulatif atau *justicia cummulativa* adalah keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa melihat jasa-jasanya<sup>29</sup>

#### **g. Tinjauan Tentang Aspek Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

---

<sup>28</sup>Anonim, Pengertian Keadilan Dan Macam-Macam Keadilan, dalam <http://www.artikelsiana.com>, acces 9 Juni 2017

<sup>29</sup> R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 63-64

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum.<sup>30</sup>

Kepastian hukum termasuk dalam aliran normatif yuridis. Aliran normatif yuridis, menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistic yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>31</sup>

#### **h. Tinjauan Tentang Aspek Kemanfaat Hukum**

Soebekti sebagai penganut aliran Utilistis, menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan

---

<sup>30</sup> Anonim, *Kepastian Hukum*, dalam <http://www.suduthukum.com>, akses 9 Juni 2017

<sup>31</sup> Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 130

kebahagiaan bagi warga masyarakat, pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi warga masyarakat.<sup>32</sup>

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum ini menurut utilitis ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 118

pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jogjakarkata : Jurnal Konstitusi, 2016, Hal 13-14





